

Hambatan yang Dihadapi Guru SD dalam Kenaikan Pangkat dengan Angka Kredit

Sunarso

Abstract: This study is designed to know the problems faced by elementary school teachers to get a promotion by the credit points system, their abilities in doing activities evaluated by the system, and their suggestions on its implementation. The population is elementary school teachers in Depok, Sleman. A sampel of 246 teachers is drawn randomly from the population. Data are collected by administering a questionnaire, and analyzed in percentages. The result shows that there are internal and external-bureaucratic problems faced by the teachers. According to the teachers, it is easy to teach, to guide their pupils, and to do other supportive activities. Professional development is supposed to be a difficult activity. They suggest that there must be a deregulation in promotion proposal and an automatic promotion system.

Keywords: hambatan, guru SD, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, angka kredit.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (SK Menpan) No. 26 tahun 1989 tanggal 2 Mei 1989 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu guru sekaligus meningkatkan mutu pendidikan nasional. SK Menpan tersebut mengatur tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Diberlakukannya SK itu bukanlah sekadar keputusan akademis akan tetapi sekaligus merupakan keputusan politis, mengingat profesi guru berkaitan erat dengan kualitas Bangsa Indonesia secara keseluruhan (Supriyoko, 1990). Oleh karena itu guru dalam menjalankan tugasnya haruslah profesional.

Sunarso adalah dosen Jurusan Mata Kuliah Umum (MKU) FPIPS IKIP Yogyakarta, magister dalam Studi Ketahanan Nasional dari Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut: (1) diperoleh melalui masa pendidikan yang panjang; (2) pelaksanaan tugas profesi harus dilandasi oleh rasa tanggung jawab yang tinggi; (3) profesi seseorang harus selalu ditingkatkan, diperbaharui, sesuai dengan kemajuan dan tuntutan jaman; (4) sesama profesi terdapat suatu ikatan (Sujud, 1991). Dengan demikian guru dapat dikatakan profesional jika telah menguasai bidang yang akan diajarkan, strategi belajar, landasan kependidikan, mampu menggunakan media pendidikan, teknik mengelola kelas, mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar, mampu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, mampu melaksanakan administrasi sekolah, serta mampu menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan kerjanya.

Dengan mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, tugas jabatan guru sebagai jabatan fungsional yang harus dilaksanakan memperoleh penilaian atau angka kredit meliputi empat unsur, yaitu pendidikan, proses belajar mengajar, pengembangan profesi, dan unsur penunjang proses belajar mengajar. Unsur pendidikan meliputi perolehan ijazah pendidikan formal, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTP) kedinasan. Unsur proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar atau praktik atau pelaksanaan proses bimbingan dan penyuluhan, pelaksanaan tugas tertentu di daerah terpencil, dan pelaksanaan tugas tertentu di sekolah. Pengembangan profesi meliputi kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan, pembuatan alat pelajaran/alat peraga, karya seni, penemuan teknologi tepat guna di bidang pendidikan, dan keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Kegiatan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan meliputi pengabdian pada masyarakat dan kegiatan pendukung pendidikan (Sukirman, 1990).

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan angka kredit, sudah barang tentu terdapat berbagai hambatan. Bentuk hambatan itu bermacam-macam. Sebagaimana dikemukakan oleh Supriyoko, untuk mengaplikasikan sistem angka kredit bagi jabatan guru ini sampai pada tingkat operasional di lapangan ternyata menghadapi lima kendala.

Pertama adalah kendala kultural. Mengubah perilaku guru yang semula cenderung pasif menjadi aktif, adalah menyangkut masalah kultural. Kedua, kendala informatif. Sampai sekarang masih banyak guru yang belum paham benar tentang aturan-aturan yang terdapat dalam sistem kenaikan pangkat dan jabatan dengan angka kredit. Ketiga, kendala lingkungan. Lingkungan di sekitar tempat guru bertugas ada yang tidak mendukung diaplikasikannya sistem angka kredit. Misalnya di daerah pedesaan dan pedalaman, guru akan menemui kesulitan

untuk mengikuti kegiatan yang menghasilkan angka kredit, seperti seminar dan temu ilmiah. Keempat, kendala birokratis. Guru dihadapkan kepada kenyataan di lapangan bahwa banyak tim penilai angka kredit yang belum bekerja sebagaimana ditetapkan dalam aturan. Kelima adalah kendala koordinatif. Koordinasi antar komponen pendidikan masih cukup lemah (Saidihardjo, 1993).

Perbedaan mendasar antara sistem kenaikan pangkat dengan angka kredit dengan sistem kenaikan pangkat otomatis terletak pada dua hal, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk setiap kenaikan dan kemampuan masing-masing guru. Apabila pada sistem kenaikan pangkat otomatis dibutuhkan waktu minimal empat tahun untuk setiap kenaikan, maka dalam sistem yang baru ini waktunya lebih diperpendek menjadi dua tahun saja asalkan jumlah angka kredit yang diperlukan telah terpenuhi. Dengan demikian kenaikan dapat terjadi kurang dari empat tahun atau sebaliknya mungkin lebih dari empat tahun, tergantung prestasi masing-masing. Guru yang berkemampuan tinggi diberi kesempatan untuk meraih kenaikan pangkat dan jabatan lebih dahulu tanpa harus menunggu guru lain yang berkemampuan rendah. Sistem angka kredit diharapkan mampu merangsang guru untuk meningkatkan kemampuan profesional dan prestasi kerjanya secara optimal dengan cara dihargai dalam bentuk angka kredit yang digunakan untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Selain itu sistem angka kredit juga memberikan penghargaan yang sama kepada guru pada semua jenjang dan jenis pendidikan dengan memberikan kemungkinan menduduki pangkat dan jabatan maksimal sebagai pegawai negeri sipil (Supriyoko, 1990).

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) hambatan apa saja yang dihadapi para guru SD untuk naik pangkat dan jabatan dengan angka kredit? (2) bagaimana kemampuan guru untuk melaksanakan butir-butir kegiatan yang dihargai dengan angka kredit? (3) apa saran para guru agar pelaksanaan kenaikan pangkat dan jabatan dengan angka kredit dapat berjalan lancar?

METODE

Populasi penelitian ini adalah para guru Sekolah Dasar yang berstatus pegawai negeri sipil di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan hanya sebagian yang diambil sebagai sampel. Sampel diambil dengan menggunakan teknik rambang berstrata. Dari 62 sekolah dasar yang ada di wilayah Ranting Dinas Dikbud Kecamatan Depok masing-masing diambil 4 orang responden secara rambang.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan angket (kuesioner). Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertutup dengan pilihan ganda. Selanjutnya angket juga dilengkapi dengan pertanyaan terbuka, yang dimaksudkan untuk menampung saran dan pendapat dari para guru tentang pelaksanaan kenaikan pangkat dan jabatan dengan angka kredit. Validitas instrumen dikaji dari sudut validitas isi (*content validity*), yakni mengkonfirmasi butir-butir instrumen ke butir-butir kegiatan guru dalam mengumpulkan angka kredit berdasarkan SK No. 26/Menpan/1989. Uji reliabilitas tidak dilakukan oleh peneliti, karena data dalam penelitian ini merupakan data faktual. Analisis dilakukan secara statistik deskriptif persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya dua macam hambatan yang dihadapi guru untuk naik pangkat dengan angka kredit yaitu hambatan yang bersifat internal yang bersumber dari diri masing-masing guru, dan hambatan eksternal yang berasal dari sistem birokrasi.

Sebanyak 35% responden mengaku belum begitu faham dengan seluk belum peraturan angka kredit untuk kenaikan jabatan. Sebagian responden (23,55%) merasa sulit mengubah perilaku pasif menjadi aktif dalam pengumpulan angka kredit, karena mereka telah terbiasa dengan sistem kenaikan pangkat reguler setiap 4 tahun. Sebanyak 42,3% responden merasa agak malas untuk mengusulkan berkas kenaikan pangkat dengan sistem angka kredit, karena pihak guru harus aktif mempromosikan dirinya sendiri, sementara 14,6% responden merasa puas dengan pangkat dan jabatan yang dimiliki sekarang, sehingga kelompok ini kurang terpacu untuk mengumpulkan angka kredit. Hal ini kebanyakan terjadi pada guru yang telah berusia cukup tua dan telah menduduki jabatan atau pangkat yang cukup tinggi. Sejumlah 13,8% responden mengaku malas mengusulkan kenaikan pangkat karena imbalan ekonomisnya kurang memadai.

Yang menyangkut hambatan eksternal, 51,2% responden menyatakan bahwa tugas administrasi guru terlalu berat sehingga menghambat pengumpulan angka kredit. Cukup besarnya responden yang menyatakan beratnya tugas administrasi guru SD memang masuk akal, mengingat guru SD adalah guru tunggal di kelas yang menjalankan semua tugas sendirian, baik tugas yang bersifat edukatif maupun tugas administratif. Sebanyak 40,5% responden menilai prosedur pengusulan pangkat dengan angka kredit cukup rumit, 21,1% responden menyatakan usul kenaikan pangkat pernah dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan. Yang menarik, 6,5% responden merasakan adanya hambatan yang

datang dari guru senior (pembimbing), meskipun sebenarnya hambatan ini tidak begitu berarti karena persentasenya sangat kecil.

Penilaian responden terhadap pelaksanaan butir-butir kegiatan dan usaha memperoleh angka kredit dari butir-butir kegiatan seperti yang telah ditetapkan oleh SK No. 26/Menpan/1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru maupun peraturan pelaksanaannya kurang menunjukkan keragaman. Pada unsur utama pendidikan, mengikuti pendidikan formal dinilai mudah oleh 55,3%. Kemudahan ini berkaitan erat dengan program diwajibkannya para guru SD untuk mengambil program Diploma II PGSD melalui Program Penyetaraan Tatap Muka (PTM) pada sore hari dengan biaya dari pemerintah.

Secara umum responden menilai mudah pelaksanaan butir-butir kegiatan dalam proses belajar mengajar dan mudah memperoleh angka kredit dari butir-butir tersebut. Dari data itu nampak bahwa hampir semua kegiatan dalam PBM dinilai mudah dilaksanakan oleh sebagian besar responden. Hanya ada dua butir kegiatan yang dinilai sulit oleh sebagian besar responden yakni menyusun kisi-kisi EBTA/EBTANAS (69,9%) dan menyusun soal EBTA/EBTANAS (61%).

Pada unsur proses bimbingan dan penyuluhan, secara umum responden menilai mudah melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, yakni membimbing siswa dalam kegiatan ekstra (70%) dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan (77,2%). Berdasarkan data itu dapat dikatakan bahwa memperoleh angka kredit dari butir kegiatan bimbingan dan penyuluhan cukup mudah.

Butir-butir kegiatan yang termasuk pengembangan profesi dinilai oleh sebagian besar responden sulit dilaksanakan. Mayoritas responden menyatakan sulit untuk mendapatkan angka kredit dari butir-butir kegiatan pengembangan profesi, yakni sulit melaksanakan penelitian (97,6%), sulit membuat karya tulis hasil tinjauan (96,7%), dan mengalami kesulitan menulis karya ilmiah yang dipresentasikan (95,9%). Selain itu, (96,7%) responden merasa sulit mempublikasikan tulisan ilmiah populer, (95,9%) sulit menjadi pemrasaran dalam pertemuan ilmiah dan (90,2%) responden menyatakan sulit untuk membuat buku. Butir-butir pengembangan profesi ini ternyata tidak semuanya dirasakan sulit oleh responden, terbukti ada beberapa butir yang dinilai agak mudah. Sebanyak 74,8% responden menyatakan mudah untuk membuat alat peraga pendidikan, 73,2% merasa mudah dalam melaksanakan pengembangan kurikulum, dan 87% responden menyatakan sulit untuk menemukan teknologi tepat guna di bidang pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada prinsipnya faktor-faktor yang menghambat guru dalam mengumpulkan angka kredit dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hambatan yang datang dari dalam diri responden (internal) dan hambatan yang datang dari luar diri responden (eksternal). Hambatan internal meliputi rasa malas, tidak memahami aturan angka kredit, sulit mengubah perilaku pasif menjadi aktif, dan pandangan bahwa imbalan ekonomis yang diterima dari kenaikan pangkat relatif kurang memadai. Hambatan eksternal meliputi rumitnya prosedur usul kenaikan pangkat, beratnya tugas administratif para guru, dan seringnya usulan ditolak.

Butir-butir kegiatan pengembangan profesi pada umumnya sulit dilaksanakan. Sedangkan butir-butir kegiatan mengajar, membimbing dan kegiatan penunjang mudah dilaksanakan. Sebagian besar responden sudah memahami seluk beluk peraturan angka kredit dengan baik.

Terdapat 5 saran dari responden terhadap pelaksanaan sistem angka kredit, diantaranya menyangkut perlunya informasi dan pembinaan tentang angka kredit termasuk cara pengusulan kenaikan pangkat, perlunya sistem angka kredit diberlakukan bersama-sama dengan sistem kenaikan pangkat otomatis, serta perlunya penyederhanaan prosedur pengusulan.

Saran

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan tersebut, diajukan beberapa saran sebagai berikut: (1) prosedur pengusulan pangkat dengan angka kredit perlu disederhanakan; (2) beban administrasi guru SD perlu dikurangi guna memberi kesempatan kepada guru untuk mengumpulkan angka kredit; (3) butir-butir kegiatan yang dinilai sulit pengumpulan angka kreditnya hendaknya mendapatkan perhatian khusus untuk penanganannya; (4) faktor-faktor penghambat dan saran-saran terhadap pelaksanaan sistem angka kredit yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang terkait.

DAFTAR RUJUKAN

- Sujud, Aswarni. 1991. *Intensitas Kelompok Kerja Guru*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Sukirman, Hartati. 1990. *Angka Kredit Bagi Jabatan Guru*. Makalah Pengabdian Masyarakat. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.

- Saidihardjo. 1993. *Monitoring Kegiatan Guru dalam Mengumpulkan Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan serta Hambatan yang Dihadapinya, Studi Deskriptif di Kalangan Guru SMTP dan SMTA Negeri se-DIY*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Supriyoko. 1990. *Konsep dan Perspektif Sistem Angka Kredit bagi Jabatan Guru*. Makalah Seminar. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.